



Analisis Efektivitas Peranan Strategis Dinas Koperasi dan UKM dalam Upaya Pelaksanaan Program Pengembangan UMKM di Kabupaten Sikka

Maria Advensia Tia¹, Wilhelmina Mitan², Paulus Libu Lamawitak³

^{1,2,3}Universitas Nusa Nipa, Indonesia

Abstract. *This research aims to determine the effectiveness analysis of the strategic role of the Department of Cooperatives and SMEs in implementing the UMKM development program in Sikka Regency. Data analysis uses Qualitative Analysis with the interview method. The results of this research show that, firstly, the strategic role carried out by the District Cooperatives and SMEs Service. Sikka is education and training which aims to increase the capacity and abilities of MSME players and facilitate the process of processing business legalization such as permits, MUI certificates, halal and so on. The two efforts that have been carried out by the Department of Cooperatives and SMEs include providing training to MSMEs, both technical training and training to increase the insight of MSME players. Third, efforts to implement the MSME development program carried out by the Sikka Regency Cooperative and SME Service have not been effective due to various obstacles, namely internal factors such as a lack of budget for coaching assistance, as well as external factors such as a low entrepreneurial spirit, the level of consumption of products produced by MSMEs also low, as well as low marketing of local products produced by MSMEs.*

Keywords: *Sikka Regency Cooperative, SME Service, Implementation of the UMKM development program.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis efektivitas peranan strategis Dinas Koperasi dan UKM dalam upaya pelaksanaan program pengembangan UMKM di Kabupaten Sikka. Analisis data menggunakan Analisis Kualitatif dengan metode wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama Peranan strategis yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kab. Sikka yakni pendidikan dan pelatihan yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan kemampuan dari para pelaku UMKM serta memfasilitasi dalam proses pengurusan legalisasi usaha seperti perijinan, sertifikat MUI, halal dan sebagainya. Kedua upaya yang telah dilakukan Dinas koperasi dan UKM seperti memberikan pelatihan-pelatihan kepada UMKM baik pelatihan teknis maupun pelatihan guna meningkatkan wawasan pelaku UMKM. Ketiga Upaya pelaksanaan program pengembangan UMKM yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sikka belum berjalan dengan efektif dikarenakan berbagai kendala yakni dari faktor internal seperti kekurangan anggaran untuk pendampingan pembinaan, serta faktor eksternal seperti jiwa kewirausahaan yang masih rendah, tingkat konsumtif terhadap produk yang dihasilkan UMKM juga rendah, serta rendahnya pemasaran atas produk lokal yang dihasilkan dari pelaku UMKM.

Kata Kunci: Dinas Koperasi, UKM Kabupaten Sikka, Pelaksanaan Program pengembangan UMKM.

1. PENDAHULUAN

Pada Negara berkembang salah satu yang menjadi prioritas utama dalam melaksanakan kegiatan negaranya adalah pembangunan nasional, begitu halnya dengan bangsa Indonesia. Salah satu hal yang diperhatikan dalam pembangunan nasional di Indonesia adalah dibidang ekonomi. Sesuai dengan cita-cita bangsa indonesia ini adalah untuk mensejahterakan rakyatnya, dan dapat membangun perekonomian yang kuat. Dalam hal ini masyarakat merupakan salah satu bagian penting dari *stakeholder* yang ada. Dengan munculnya Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang berasal dari masyarakat dan untuk masyarakat. Hal ini sangat sesuai dengan cita-cita bangsa. Koperasi dan Usaha Mikro

Kecil dan Menengah merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu bangsa dan daerah tak terkecuali di Indonesia. Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan salah satu motor penggerak perekonomian Indonesia. Sejak krisis moneter ditahun 1997-1998 hampir 80 persen usaha yang dikategorikan besar mengalami kebangkrutan dan malah UMKM dapat bertahan dalam krisis dengan segala keterbatasan dan kemampuan yang dimilikinya (Sari, 2021).

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan penting dalam peningkatan perekonomian daerah maupun perekonomian suatu negara. Menurut Tambunan (2012) di Indonesia, UMKM terbukti memiliki peran yang penting dalam mengatasi akibat dan dampak dari krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 yang mana banyak dari perusahaan-perusahaan besar mengalami kebangkrutan, sedangkan UMKM mampu bertahan dengan kondisi krisis tersebut. Selain itu, sektor ini mampu meningkatkan pendapatan per kapita atau Produk Domestik Bruto (PDB) masyarakat karena mampu menyerap tenaga kerja yang cukup banyak.

UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM. Dalam Bab 1 (Ketentuan Umum), Pasal 1 dari undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha mikro atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut.

Menurut (Sumarno dan Imawati, 2023) pengembangan memusatkan perhatiannya tidak hanya pada analisis kebutuhan, tetapi juga isu-isu luas tentang analisis awal-akhir, seperti analisis kontekstual. Pengembangan bertujuan untuk menghasilkan produk berdasarkan temuan-temuan uji lapangan. Pada hakekatnya pengembangan adalah upaya pendidikan baik formal maupun nonformal yang dilaksanakan secara sadar, berencana, terarah, teratur dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, mengembangkan suatu dasar kepribadian yang seimbang, utuh, selaras, pengetahuan, keterampilan sesuai dengan bakat, keinginan serta kemampuan-kemampuan, sebagai bekal atas prakarsa sendiri untuk menambah, meningkatkan, mengembangkan diri ke arah tercapainya martabat, mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal serta pribadi mandiri.

Pengembangan merupakan kriteria efektivitas yang mengacu pada tanggung jawab organisasi atau perusahaan dalam upaya memperbesar kapasitas dan potensinya untuk dapat berkembang. Pengembangan adalah kriteria efektivitas yang menunjuk kepada kemampuan organisasi untuk memandang jauh kedepan dan melakukan investasi dalam rangka mempertahankan hidup dan mengembangkan usaha organisasi.

Menurut Kurniyawati (2019) Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksana (Kurniyawati *et al.*, 2019).

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas menekankan pada hasil atau efeknya dalam pencapaian tujuan. Menurut pendapat Mahmudi (2019) Efektifitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan (Mahmudi, 2019). Berdasarkan pendapat tersebut, bahwa efektivitas mempunyai hubungan timbal balik antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output*, maka semakin efektif suatu program atau kegiatan. Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan.

Suryaningrum *et al.*, (2015), dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Usaha Mikro Kecil Menengah) (Suatu Studi Di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil. Dan Menengah Kota Manado)”. Di ukur dengan indikator Produksi, program-program pengembangan UMKM oleh Dinas Koperasi dan UMK Kota Manado sudah berjalan efektif. Terjadi peningkatan dari segi kualitas maupun kuantitas. Dari sisi pemasaran dari usaha pelaku UMKM sampai saat ini cukup signifikan mengingat bangsa pasar yang ada di Kota Manado ini cukup menunjang untuk peningkatan usaha Pelaku UMKM.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Efektivitas

Kata efektif berarti dapat membuahkan hasil, mulai berlaku, ada pengaruh, akibat atau efeknya. Efektivitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan. Efektivitas berarti tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan. Adapun pengertian lain dari efektivitas adalah tingkat tujuan yang diwujudkan suatu organisasi, sedangkan pengertian

efektivitas menurut beberapa ilmuwan adalah sebagai berikut Efektivitas menurut (Arisandy *et al.*, 2017) adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.

Menurut Gibson *et al.*, (2018) menyebutkan bahwa ukuran efektivitas organisasi, yaitu produksi, efisiensi, kepuasan, organisasi, dan pengembangan, berikut penjelasannya: a. Produksi adalah merupakan kemampuan organisasi untuk memproduksi jumlah dan mutu output sesuai dengan permintaan lingkungan b. Efisiensi adalah merupakan perbandingan (ratio) antara *output* dengan *input* c. Kepuasan adalah merupakan ukuran untuk menunjukkan tingkat dimana organisasi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. d. Keadaptasian adalah tingkat dimana organisasi dapat dan benar-benar tanggap terhadap perubahan internal dan eksternal e. Pengembangan adalah merupakan mengukur kemampuan organisasi untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi tuntutan.

Sedangkan menurut Duncan yang dikutip (Steers, 2022) “Efektivitas Organisasi” mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut: Pencapaian Tujuan, Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya.

Pengertian Dinas Koperasi dan UKM

Dinas Koperasi dan UKM adalah unsur pelaksanaan pemerintah provinsi yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala daerah melalui Sekretaris Daerah. Dinas Koperasi dan UKM berperan mendukung perekonomian masyarakat terutama dalam layanan penyedia dana bagi UKM. Dinas Koperasi dan UKM dapat memfasilitasi UKM didaerah atau kota-kota kecil dimana terdapat UKM dan yang sangat membutuhkan bantuan dana dengan bunga yang ringan (Zhara, 2022).

Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut kamus besar bahasa Indonesia Usaha adalah kegiatan dengan menggerakkan tenaga, pikiran, atau badan untuk suatu maksud pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya) untuk mencapai sesuatu. Salah satu sektor yang memberikan kontribusi cukup besar adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM dengan jumlahnya yang banyak dan terbesar di seluruh Indonesia dinilai maupun mengatasi berbagai permasalahan yang dialami sejak lama. (Lamawitak dkk, 2023). Menurut Manurung (2008) Usaha Mikro Kecil

dan Menengah atau UMKM merupakan kategori bisnis bersekala kecil yang dipercaya mampu memberikan kontribusi terhadap pekonomian Indonesia, terutama saat krisis ekonomi yang terjadi pada periode 1998 sampai dengan periode 2000an. UMKM dianggap mampu bertahan pada krisis dimana puluhan perusahaan besar mengalami kebangkrutan. (Rahmadayanti, 1967) Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki definisi yang berbeda-beda disetiap literature menurut beberapa instansi atau lembaga bahkan undang-undang. Definisi UMKM menurut Undang-Undang no 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM adalah:

- 1) Usaha Mikro adalah produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi again baik langsung maupun tidak langsung dari usaha Menengah atau usaha Besar yang memenuhi kriteria usaha Kecil sebagaimana dimaksud Undang-undang ini.
- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjdi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Jenis-Jenis UMKM

Menurut (Mulyadi, 2015) ada 3 jenis usaha yang bisa dilakukan oleh Usaha Kecil dan Menengah untuk menghasilkan laba atau keuntungan. Ketiga jenis usaha tersebut adalah:

- 1) Usaha Manufaktur (*Manufacturing Business*) Usaha manufaktur adalah usaha yang mengubah *input* dasar menjadi produk yang bisa dijual kepada konsumen. Contohnya adalah konveksi yang menghasilkan pakaian jadi atau perajin bambu yang menghasilkan mebel, hiasan rumah, sovenir dan sebagainya.
- 2) Usaha Dagang (*Merchandising Business*) Usaha dagang adalah usaha yang menjual produk kepada konsumen contohnya adalah pusat jajanan tradisional atau toko kelontong yang menjual kebutuhan sehari-hari.
- 3) Usaha Jasa (*Service Business*) Usaha jasa adalah usaha yang menghasilkan jasa bukan menghasilkan barang atau produk untuk konsumen. Sebagai contoh adalah jasa

pengiriman barang atau warung internet yang menyediakan alat dan layanan kepada konsumen.

Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas menekankan pada hasil atau efeknya dalam pencapaian tujuan. Menurut pendapat Mahmudi dalam bukunya “Manajemen Kinerja Sektor Publik” mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut : “Efektifitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan” (Mahmudi, 2019). Berdasarkan pendapat tersebut, bahwa efektivitas mempunyai hubungan timbal balik antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output*, maka semakin efektif suatu program atau kegiatan. Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan.

Strategis Efektifitas

Strategis sangat penting untuk kelangsungan hidup perusahaan guna mencapai tujuan perusahaan yang efektif dan efisien, perusahaan harus mampu menghadapi segala permasalahan atau hambatan dari dalam maupun luar perusahaan. Strategi adalah alat untuk mencapai tujuan, dalam proses perkembangannya konsep strategi harus terus dikembangkan, setiap orang memiliki pandangan atau definisi strategi yang berbeda. Strategi di bidang bisnis atau bisnis perlu untuk mewujudkan visi dan misi perusahaan, serta tujuan untuk mewujudkan tujuan jangka pendek atau jangka panjang.

3. METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian Kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, dan digunakan untuk meneliti objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisi data bersifat induktif/deduktif, hasil penelitian kualitatif ini menekankan pada pemahaman makna dan mengkontruksi fenomena dari pada generalisasi. (Sugiyono, 2019)

Sebagaimana yang dikemukakan (Moleong, 2016), menyebutkan bahwa Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, video tape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya. Penelitian dengan pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika alamia. Dilihat dari jenis data yang dikumpulkan, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif.

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan, data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. (Arikunto, 2017)

Kehadiran Peneliti

Dalam Penelitian ini kehadiran penelitian melalui peneliti sangat diperlukan karena peneliti itu sendiri yang akan bertindak sekaligus sebagai instrument pengumpulan data, sehingga peran peneliti disini adalah sebagai pengamat penuh yakni mengamati secara penuh (keseluruhan) sesuai fokus masalah yang sudah ditentukan sebelumnya. Dalam hal ini peneliti diketahui statusnya sebagai peneliti oleh objek atau informan karena peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada pihak yang bersangkutan serta melakukan suatu pengamatan.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yaitu Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kab. Sikka. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada 22 Mei sampai 15 Juni 2024.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sejarah singkat Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sikka

Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah merupakan salah satu organisasi pemerintah sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang koperasi. Dinas Koperasi pada awalnya didirikan pada tahun 1970-an dengan nama Departemen Koperasi. Departemen Koperasi yang pada periode pertamanya mempunyai tiga jabatan yaitu Perdagangan, Koperasi dan transmigrasi. Pada periode ke dua yaitu pada tahun 1985 departemen koperasi mulai berdiri sendiri yang hanya mengurus dua jabatan yaitu perdagangan dan koperasi. Setelah otonomi daerah pada tahun 1998, departemen koperasi berganti nama menjadi Dinas Koperasi.

Tahun 2008 dengan tiga jabatan yaitu Perdagangan dan Koperasi UKM. Setelah Otonomi itulah Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sikka berdiri. Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM adalah Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sikka. Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM adalah Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM Kabupaten Sikka. Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM Kabupaten Sikka terletak di Jalan Eltari No. 5, Kecamatan Alok, Kelurahan Kota Uneng.

Hasil Penelitian

Analisis Kualitatif

Untuk menganalisa data yang diperoleh dari hasil penelitian, peneliti menggunakan analisa deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang hasilnya dalam bentuk uraian deskriptif bukan dalam bentuk angka. Analisis kualitatif dalam penelitian ini adalah digunakan untuk mengetahui Analisis Efektivitas Peranan Strategis Dinas Koperasi Dan UKM Dalam Upaya Pelaksanaan Program Pengembangan UMKM yang ada di kabupaten Sikka.

1) Peranaan strategis Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sikka dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Sikka

Peranan strategis merujuk pada peranan atau posisi yang penting dan vital dalam mencapai tujuan strategis atau tujuan jangka panjang suatu organisasi. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro memberdayakan pelaku UMKM dalam hal memberikan pembinaan, pelatihan, kewirausahaan, pelatihan pemasaran online serta pelatihan manajemen keuangan. Terkait peranan strategis Dinas Koperasi dan UKM

Kabupaten Sikka, peneliti melakukan wawancara bersama Bapak V selaku kepala Dinas yang dilakukan pada tanggal 11 Juni 2024: Bagaimana peranan strategis Dinas Koperasi dan UKM Kab. Sikka dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Sikka?. Hasil jawaban sebagai berikut:

“Tugas Dinas itu adalah satu pemberdayaan dan pengembangan. Konkrit pemberdayaan dan pengembangan itu dalam program pendidikan dan pelatihan. Ya, jadi kita lakukan setiap tahun tahun. Anggaran Dana Alokasi Khusus Kementerian Koperasi memberikan pendidikan dan pelatihan bagi pertama wirausaha pemula, bagi pelaku UMKM baik manajemen keuangan, kemudian literasi pemasaran yah untuk produk- produk UMKM. Juga memfasilitasi UMKM untuk proses pengurusan legalisasi usaha seperti perizinan, sertifikasi Mui, Halal dan sebagainya”

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara bersama Kabid Pemberdayaan Koperasi dan UKM Kabupaten Sikka, ibu L pada tanggal 12 Juni 2024 terkait program yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM dengan pertanyaan sebagai berikut : “Program apa saja yang sudah dibuat oleh Dinas Koperasi dan UKM Kab. Sikka untuk mendukung terjadinya kemudahan akses terhadap pengembangan usaha UMKM?. Hasil wawancara sebagai berikut:

“Kita tu bicara tentang program besar tugas dari Dinas ada pemberdayaan dan pengembangan yakan, untuk urusan terkait dengan UMKM itu ada kegiatan-kegiatan pendidikan dan pelatihan itu dengan kegiatannya itu apa meningkatkan kapasitas dan kemampuan dari pada para pelaku UMKM yah kan yaitu terkait diklat.”

Untuk mengetahui seberapa jauh peranan stategis Dinas Koperasi dan UKM Kab. Sikka maka peneliti mengajukan pertanyaan terkait proses pelaksanaan program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kab. Sikka kepada ibu L selaku Kabid Pemberdayaan. Jawaban atas pertanyaan “Bagaimana proses pelaksanaan program yang akan dilaksanakan oleh dinas Koperasi daan UKM Kab. Sikka??:

“pelaksanaannya seperti apa yaitu kami melakukan pendidikan dan pelatihan itu dengan kegiatan itu disini ada beberapa program ada tiga program untuk dibidang ini yaitu program pelatihan, pengembangan dan pemberdayaan UMKM sesuai dengan tusinya tadi kita melakukan pemberdayaan itu tadi dengan melakukan diklat UMKM, terus diklat itu ada diklat berkaitan dengan

pengetahuan, wawasan dan diklat teknis. Diklat teknis dengan langsung melakukan pelatihan baik berupa pengolahan bahan lokal yakan. Ada juga diklat- diklat pengetahuan itu terkait dengan bagaimana meningkatkan wawasan pelaku UMKM, berkaitan dengan literasi digital terus ada literasi keuangan tentang pengetahuan dan bagaimana tentang kewirausahaan itu sendiri yang ilmu pengetahuannya harus diketahui oleh pelaku UMKM.”

Dari hasil wawancara bersama Kepala Dinas dan Kabid pemberdayaan menunjukkan bahwa peranan strategis yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kab. Sikka yakni pendidikan dan pelatihan yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan kemampuan dari pada para pelaku UMKM serta memfasilitasi dalam proses pengurusan legalisasi usaha seperti perijinan, sertifikat MUI, halal dan sebagainya. Pendidikan dan pelatihan yang diberikan berisi tentang pengetahuan, wawasan dan diklat teknis dengan langsung melakukan pelatihan berupa pengolahan bahan lokal . Ada juga diklat-diklat pengetahuan terkait dengan bagaimana meningkatkan wawasan pelaku UMKM, berkaitan dengan literasi digital, literasi keuangan tentang pengetahuan dan bagaimana tentang kewirausahaan itu sendiri yang ilmu pengetahuannya harus diketahui oleh pelaku UMKM.

2) Upaya Dinas Koperasi dan UKM dalam melaksanakan program pengembangan UMKM

Upaya Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sikka sangat penting sebagai upaya peningkatan ekonomi kerakyatan dan memperdayakan Koperasi dan UMKM untuk menunjukkan keterlibatan atau keikutsertaan individu, kelompok yang melakukan suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu atas suatu tugas atau bukti yang sudah merupakan kewajiban dan harus dilakukan sesuai dengan kedudukannya.

Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sikka maka peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada Kepala Dinas dengan pertanyaan sebagai berikut : “Bagaimana upaya Dinas Koperasi dan UKM dalam Melaksanakan Pengembangan UMKM?”. Jawaban atas pertanyaan tersebut sebagai berikut:

“Upaya kita di dalam pemberdayaan dan pengembangan dengan memberikan pelatihan-pelatihan kepada UMKM baik pelatihan teknis maupun pelatihan meningkatkan wawasan. Pelatihan seperti pengolahan abon ikan ada pelatihan manajemen kewirausahaan, mengurus surat ijin, mengalokasi UMKM itu bagaimana ketersediaan produk selalu siap”.

Selain itu Peneliti juga melakukan wawancara bersama ibu L selaku Kabid Pemberdayaan untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan dengan pertanyaan sebagai berikut: “Usaha apa saja yang dilakukan Dinas Koperasi dan UKM Kab. Sikka untuk memberikan sarana dan prasarana kepada para pelaku UMKM?”, dan jawaban atas pertanyaan sebagai berikut:

“Berkaitan dengan saran prasarana itu berkaitan dengan pendampingan-pendampingan yaitu di mana kita berharap kita mengalokasikan agar para pelaku UMKM itu memiliki izin yah, sekecil apa pun pelaku usaha itu dia harus memiliki izin Nomor Induk Berusaha (NIB). Kita juga pada tahun ini juga melakukan pembangunan Rumah Pemasaran Produk UMKM, itu salah satu bentuk upaya-upaya pemerintah bagaimana agar produk- produk dari UMKM itu sendiri dapat dipasarkan”

Upaya-upaya yang telah dilakukan tidak terlepas dari bagaimana bentuk pelatihan yang diberikan. Maka dari itu peneliti ingin mengetahui bentuk bentuk pelatihan yang telah dilakukan dengan pertanyaan sebagai berikut: ”Bagaimana bentuk pelatihan yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kab. Sikka kepada usaha kecil dan menengah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengusaha kecil dan menengah?”. Jawaban Kepala Dinas UKM Kab. Sikka yaitu:

“salah satu bentuk pelatihan yaitu yang pertama adalah pelatihan yang berkaitan dengan produk pengolah dari bahan mentah menjadi bahan baku misalnya pengolahan coklat dari bahan dasar coklat, dari bahan dasar mente, itu yang kita lakukan. Dari bahan dasar kelor atau daun kelor, biji kelor itu diberikan pelatihan berdasarkan potensi. Yang kedua pelatihan kaitan dengan manajemen keuangan. Yah, itu juga kita berikan pelatihan, kemudian digitalisasi pemasaran bagaimana memasarkan produk-produk secara online dengan menggunakan hp android yang ada”.

Selain itu bentuk bimbingan dan pelatihan yang diberikan Dinas Koperasi dan UKM Kab. Sikka kepada UMKM menurut Kabid Pemberdayaan, ibu L dengan pertanyaan sebagai berikut: “Bagaimana bentuk bimbingan dan pelatihan yang diberikan Dinas Koperasi dan UKM Kab. Sikka kepada UMKM yang terkait dengan produksi?”. Jawaban atas pertanyaan sebagai berikut:

“Terkait produksi yah kita selalu memberikan pelatihan teknis dalam hal ini contoh kaya baru berapa minggu yang lalu yaitu pelatihan teknis bagaimana mengolah bahan lokal. Seperti kemarin mengolah bahan lokal dari kelor. Bagaimana kita membuat biji kelor menjadi tempe terus daun kelornya kita

produk ubah menjadi stick kelor dan kerupuk kelor. Tahun lalu ada pengolahan coklat, nah seperti itu terkait dengan olahan-olahan terkait dengan bahan lokal yang bisa kita olah, jadi menambah nilai jual dari pada produk tersebut. Kalau kita menjual daun kelor murah kan tapi kalau kita menjual stick kelor mahal kan, jadi selain menambah nilai ekonomisnya sehingga bisa meningkatkan pendapatan dari para pelaku UMKM.”

Dengan upaya-upaya yang telah diberikan menunjukkan bahwa dinas UKM Kab. Sikka sungguh berupaya agar pelaku UMKM mampu berkembang baik dari segi wawasan, pengetahuan dan inovasi yang berguna dalam perkembangan usaha. Namun peneliti juga ingin mengetahui bagaimana evaluasi dari hasil program yang telah dilaksanakan guna melihat kekurangan apa saja dari program atau upaya yang telah diberikan bagi pelaku UMKM dengan pertanyaan sebagai berikut: “Bagaimana bentuk evaluasi yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan UKM Kab. Sikka yang berhubungan dengan permodalan, pemasaran, produksi dan SDM?”. Jawaban yang diberikan oleh kepala Dinas Koperasi dan UKM sebagai berikut:

“Salah satu bentuk evaluasi kita adalah kita berkeinginan agar setiap tahun UMKM yang berkeinginan mengakses modal dilembaga keuangan atau dikoperasi harus mempunyai kemampuan untuk analisa bisnis, jadi mampu membuat rencana bisnis sehingga bisa kita ketahui dia bisa bertahan itu dalam jangka waktu berapa tahun”.

Dari hasil wawancara bersama Kepala Dinas dan Kabid Pemberdayaan Dinas Koperasi dan UKM kabupaten Sikka menunjukkan bahwa terdapat berbagai upaya yang telah dilakukan seperti memberikan pelatihan-pelatihan kepada UMKM baik pelatihan teknis maupun pelatihan guna meningkatkan wawasan pelaku UMKM. Bentuk Pelatihan yang diberikan seperti pengolahan abon ikan, pelatihan manajemen kewirausahaan, mengurus surat ijin. Selain itu bentuk pelatihan lainnya yaitu berkaitan dengan produk pengolah dari bahan mentah menjadi bahan baku misalnya pengolahan coklat dari bahan dasar coklat dan dari bahan dasar mente, dari bahan dasar kelor atau daun kelor menjadi stik dan kerupuk kelor, kemudian digitalisasi pemasaran bagaimana memasarkan produk- produk secara online dengan menggunakan hp android. Dinas UKM dan Koperasi Kabupaten Sikka juga melakukan evaluasi terkait bentuk-bentuk pelatihan yang telah diberikan dan juga hal-hal apa saja yang mendukung pertumbuhan UMKM di Kabupaten Sikka seperti evaluasi mengenai

kemampuan analisa bisnis serta akses permodalan bagi pelaku UMKM di Kabupaten Sikka.

3) Upaya pelaksanaan pogram pengembangan UMKM yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM berjalan dengan Efektif

Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan yang tidak tercapai, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Efektivitas Pelaksanaan Program Pengembangan didefinisikan sebagai pengukuran terhadap sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program pengembangan UMK dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pasca tsunami dalam memberikan kontribusi untuk membantu pelaku Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah.

Peneliti ingin mengetahui apakah upaya pelaksanaan program pengembangan UMKM yang dilakukan oleh Dinas koperasi dan UKM Kabupaten sudah berjalan dengan efektif dengan melakukan wawancara kepada kepala Dinas UKM Kabupaten Sikka pada tanggal 11 juni 2024. Bentuk pertanyaan yang diajukan sebagai berikut :”Apakah upaya pelaksanaan program pengembangan UMKM yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM berjalan dengan efektif?”. Jawaban atas pertanyaan yaitu sebagai berikut:

“dalam sebuah pelaksanaan kegiatan tidak berjalan dengan sempurna pasti ada kendalanya bawah kita berusaha untuk mencapai titik efektif baik kita sebagai seorang pemerintah harus terus berupaya untuk membangun yang namanya manusia, bawah membangun manusia itu tidak segampang kita membalik telapak tangan, kita pemberdayaan dan pengembangan UMKM ini bagaimana kita bisa memotifasi seorang untuk berwirausaha selain dia bisa berwirausaha yang baik dan benar jangan sampe ini hari buka besok tutup, kita sebagai pemerintah harus tidak jenuh-jenuhnya harus tidak bosan-bosanya tetap berjuang sumber daya manusia. Misalnya kalau insfatuktur kita bangun tahun ini kita bisa lihat hasilnya beda dengan manusia kita bangun tahun ini pasti kita lihat 15 tahun kedepanya, jadi orang bilang kemungkinan efektif kita harus setiap saat walaupun dalam perhatian 10% yang bisa berubah karena kita memotifasi orang mungkin dari sekian prserta mungkin hanya 10 orang yang bisa ikut, kita lakukan dan itulah tidak boleh jenuh-jenuh untuk membangun manusia.”

Hasil wawancara menunjukan bahwa upaya pelaksanaan program pengembangan UMKM di Kabupaten Sikka belum berjalan dengan efektif dikarenakan adanya kendala terkait sumber daya manusia pelaku UMKM. Mengenai kendala yang dihadapi, maka peneliti mengajukan pertanyaan terkait kendala apa saja yang dihadapi kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sikka dengan pertanyaan sebagai berikut: “Kendala apa saja yang dihadapi Dinas Koperasi dan UKM Kab. Sikka dalam memberikan penembangan pada pelaku UMKM?”. Jawaban bapak kepala dinas, V adalah sebagai berikut:

“Yang pertama yang namanya kalau kita membuat sebuah kegiatan pasti membutuhkan dukungan anggaran, nah selama ini anggaran itu kita baru dapat dukungan dari Dana Alokasi Khusus, jadi masih ada keterbatasan anggaran untuk pendampingan pembinaan dan pelatihan pada para pelaku umkm. Yang kedua, terus sementara selain kita sudah melakukan motivasi tentunya kendala dari pelaku UMKM itu sendiri, walaupun pemerintah sudah berupaya untuk memberikan pelatihan sekarang tergantung dari UMKM itu sendiri, apakah dia mau berubah atau tidak. Sekeras apapun usaha dari pemerintah untuk memberikan pendampingan atau pelatihan kepada pelaku UMKM tapi dari pelaku UMKM itu sendiri tidak ada komitmen dari dirinya untuk maju itu pun juga sama saja”.

Selain itu peneliti juga mengajukan pertanyaan kepada Kabid Pengembangan Dinas UKM dan Koperasi Kab. Sikka terkait kendala yang dihadapi dinas UKM Kabupaten Sikka dalam upaya pengembangan pelaku UMKM dengan pertanyaan: “Kendala apa saja yang dihadapi Dinas Koperasi dan UKM Kab. Sikka dalam memberikan pengembangan pada pelaku UMKM?”. Jawaban Ibu Cicilia Lilis sebagai berikut:

“Yang pertama, faktor internal UMKM, jiwa kewirausahaan kita rendah, tingkat konsumtif kita terhadap produk yang dihasilkan UMKM juga rendah untuk masyarakat kita. Yang kedua kendala soal pemasaran kita susah sekali untuk pemasaran, banyak produk produk kita yang tidak bisa dipasarkan dan yang ketiga peningkatan kualitasnya masih rendah”.

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa upaya pelaksanaan pogram pengembangan UMKM yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sikka belum berjalan dengan efektif dikarenakan berbagai kendala yakni dari faktor internal seperti kekurangan anggaran untuk pendampingan pembinaan, serta faktor

eksternal seperti jiwa kewirausahaan yang masih rendah, tingkat konsumtif terhadap produk yang dihasilkan UMKM juga rendah, serta rendahnya pemasaran atas produk lokal yang dihasilkan dari pelaku UMKM. Selain itu kendala utama yang dihadapi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sikka yaitu berkaitan dengan SDM pelaku UMKM yang mana masih minim pengetahuan dan wawasan dalam berwirausaha.

Pembahasan

1) Peranan Strategis Dinas Koperasi Dan UKM Dalam Pengembangan UMKM Di Kabupaten Sikka

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro memberdayakan pelaku UMKM dalam hal memberikan pembinaan, pelatihan, kewirausahaan, pelatihan pemasaran online serta pelatihan manajemen keuangan. Beberapa peranan yang biasa dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM:

- a) Pengembangan Koperasi dan UKM. Dinas ini bertanggung jawab untuk mengembangkan koperasi dan UKM sebagai sektor ekonomi yang kuat dan berkelanjutan.
- b) Pemberdayaan UKM. Memberikan bimbingan, pelatihan dan pendampingan kepada pelaku UKM untuk meningkatkan kualitas dan daya saing usaha mereka.
- c) Pengawasan dan pembinaan. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan koperasi dan UKM untuk memastikan bawah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memberikan pembinaan yang diperlukan.
- d) Pengelolaan dana. Mengolah dana dan program-program bantuan yang ditujukan untuk koperasi dan UKM guna mendukung pertumbuhan dan pengembangan mereka.

Dari hasil wawancara di atas menunjukan bahwa dinas UKM Kabupaten Sikka berupaya untuk meningkatkan serta memberdayakan pelaku UMKM seperti memberikan pelatihan dan pembinaan bagi pelaku UKM serta mempermudah para pelaku UKM dalam menjalankan usaha seperti memfasilitasi dalam pengurusan legalisasi usaha. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Panjaitan (2019) yang mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa peran pemberdayaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan sudah mampu meningkatkan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah Kota Medan dalam peningkatan kualitas produk, diversifikasi produk, peningkatan jumlah produksi dan peningkatan keuntungan usaha.

Pengembangan tersebut terjadi khususnya karena pemberdayaan kemudahan perizinan yang sudah berjalan dengan baik.

2) Upaya Dinas Koperasi dan UKM dalam melaksanakan Program Pengembangan UMKM

Upaya Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sikka sangat penting sebagai upaya peningkatan ekonomi kerakyatan dan memperdayakan Koperasi dan UMKM untuk menunjukkan keterlibatan atau keikutsertaan individu, kelompok yang melakukan suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu atas suatu tugas atau bukti yang sudah merupakan kewajiban dan harus dilakukan sesuai dengan kedudukannya. Upaya Dinas Koperasi dan UKM (Usaha Kecil dan Menengah) Kabupaten Sikka berarti menunjukkan pada keterlibatan untuk melakukan pembinaan Koperasi melalui diklat pelatihan Dinas Koperasi dan UKM (Usaha Kecil dan Menengah) Kabupaten Sikka. Upaya yang dilakukan yaitu Dinas Koperasi dan UKM berkeinginan agar UMKM bisa berkembang UKM dalam melaksanakan program pengembangan UMKM salah satu upaya pelatihan teknis maupun pelatihan meningkatkan wawasan. Bentuk-bentuk pengembangan UMKM yakni:

a. Penciptaan Iklim Usaha Yang Kondusif

Menurut (Adelia, 2021), Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif adalah Pemerintah perlu mengupayakan terciptanya iklim yang kondusif antara lain mengusahakan ketentraman dan keamanan berusaha serta penyederhanaan prosedur perizinan usaha, keringanan pajak dan sebagainya.

Proses pengembangan pada tahap Penciptaan Iklim Usaha yang kondusif Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sikka dengan mempermudah proses perijinan dan jga menjamin perlindungan kepada para pelaku usaha.

Dari uraian di atas maka diketahui bahwa upaya yang dilakukan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sikka berdasarkan tugas utama dinas yaitu pemberdayaan dan pengembangan UMKM. Konkrit pemberdayaan dan pengembangan dalam program pendidikan dan pelatihan. Setiap tahun melalui Anggaran Dana Alokasi Khusus Kementerian Koperasi memberikan sosialisasi berupa pendidikan dan pelatihan bagi wirausaha pemula, pelaku UMKM baik tentang manajemen keuangan, pemasaran untuk produk- produk UMKM dan literasi digital. Dengan bentuk penciptaan iklim usaha yang kondusif yang sudah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sikka dapat menciptakan

peluang serta iklim untuk masyarakat atau para pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya.

Implikasi Teori Pengembangan adalah hubungan kesinambungan antara Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sikka dan para pelaku usaha atau UMKM. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sikka berperan memberikan pengembangan kepada masyarakat atau pelaku usaha tentang pengetahuan untuk meningkatkan keterampilan guna mempengaruhi kehidupannya dengan tujuan masyarakat atau para pelaku usaha menjadi proaktif dalam menentukan arah kemajuan pengembangan usahanya sendiri. Dalam hal ini maka disimpulkan bahwa Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sikka berperan memberikan pengembangan kepada masyarakat atau pelaku usaha mengenai ilmu pengetahuan yang dilakukan dengan kegiatan program pendidikan dan pelatihan bagi para pelaku usaha atau UMKM tentang manajemen keuangan, pemasaran serta literasi digital. Hal ini dilakukan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sikka untuk dapat meningkatkan keterampilan dan kemampuan para pelaku usaha atau UMKM dalam mengolah atau mengembangkan usahanya sehingga dapat berjalan dengan baik dan memperoleh kemajuan. Selain pendidikan dan pelatihan yang dijalankan, adanya pendampingan yang di berikan berkaitan dengan NIB (Nomor Induk Berusaha).

Hasil penelitian ini sejalan dengan Penjaitan (2019) yang menunjukkan hasil bahwa Peranan Pemberdayaan Dinas Koperasi dan UMKM dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Medan dapat dikatakan sudah mampu meningkatkan pengembangan usaha Mikro, Kecil dan menengah Kota Medan dalam peningkatan kualitas produk, diversifikasi produk, peningkatan jumlah produksi dan peningkatan keuntungan usaha.

b. Bantuan Permodalan Pemerintah

Menurut (Adelia, 2021). Bantuan Permodalan Pemerintah adalah perlu memperluas skim khusus dengan syarat-syarat yang tda memberatkan bagi UMKM, untuk membantu peningkatan permodalanya, baik itu melalui sektor jasa finansial informal, skma penjaminan, leasing dan modal venture. Pembiayaan untuk UMKM sebaiknya menggunakan Lembaga keuangan Mikro bank antara lain, BRI unit desa dan Bank Perkerditan Rakyat (BPR). Dari uraian di atas maka diketahui bahwa sosialisasi yang dilakukan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sikka berdasarkan tugas utama dinas yaitu, memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan

memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Penguatan disini diartikan sebagai memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pengembangan harus mampu menumbuh kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka. Proses pengembangan yang dilakukan dengan cara pemberian bantuan dana modal kepada anggota binaan agar usaha yang mereka bangun tetap survive dan mampu meningkatkan perekonomian serta menciptakan dan menyerap lapangan pekerjaan. Bantuan pengaksesan permodalan yang dilakukan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sikka dengan memberikan informasi bagaimana mendapatkan modal kepada pihak ketiga yaitu lembaga keuangan perbankan atau non perbankan. Dengan pemberian modal hanya diperuntukkan untuk kepentingan usaha dalam menjalankan dan mengembangkan bisnis, modal tersebut digunakan hanya untuk pembelian bahan baku usaha mereka agar usaha mereka tetap bertahan dan berjalan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Rafidah R (2017) yang menunjukkan hasil bawah Analisis Peran Dinas Koperasi Dan Menengah Kota Jambi Dalam pengembangan Usaha Mikro Dan Menengah yang mendapatkan pembiayaan BRI Syariah telah melakukan kegiatan pengembangan UKM (Usaha Kecil Dan Menengah) mendapatkan pembiayaan BRI Syariah selama tahun 2010 sampai 2015 dengan mengoptimalkan peran konsultan keuangan mitra bank (KKMB), mensosialisasikan pembiayaan bagi hasil pembiayaan modal venture meningkatkan peran serta lembaga penjaminan kredit pemberdayaan koperasi dan UMKM dan pelatihan kewirausahaan bagi pelaku UMKM Kota Jambi.

c. Perlindungan Usaha Jenis-Jenis Usaha tertentu

Menurut (Adelia, 2021). Perlindungan Usaha Jenis-Jenis Usaha tertentu adalah jenis usaha tradisional yang merupakan usaha golongan ekonomi lemah, harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah, baik itu melalui undang-undang maupun peraturan pemerintah yang bermuara pada saling menguntungkan.

Perlindungan yang diberikan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sikka adalah dengan memberikan sosialisasi tentang pendidikan dan pelatihan kepada pelaku usaha sehingga dapat membangun jiwa kewirausahaan dalam mengembangkan usahanya agar tidak terdiskriminasi dari persaingan usaha.

Selain itu, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sikka juga memfasilitasi UMKM dalam proses pengurusan legalisasi usaha seperti perizinan, sertifikat MUI, dan NIB (Nomor Induk Berusaha). Pemberian perlindungan kepada usaha kecil bertujuan memupuk usaha kecil agar tetap mengembangkan usaha mereka dan mampu bersaing dengan usaha yang sejenis yang sudah survive dari segi dana dan kemampuan sumber daya manusianya.

Hal tersebut sejalan dengan Fausiah (2019) yang menyatakan bahwa pembinaan sudah efektif dilakukan terlihat dari sepenuhnya pemberian perlindungan terhadap mutu produk, adanya keseriusan pemerintah daerah dalam pemberian pembinaan berkelanjutan serta kemudahan melakukan perizinan pengelolaan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) yang menyangkut berbagai aspek dalam perkembangan usaha.

d. Pengembangan Kemitraan

Menurut (Adelia, 2021), Pengembangan Kemitraan adalah perlu dikembangkan, kemitraan yang saling membantu antar UMKM, atau antara UMKM dengan pengusaha besar baik dalam negeri maupun luar negeri, menghindari terjadinya monopoli dalam usaha. Di samping itu juga memperluas bangsa pasar dan pengelolaan bisnis yang lebih efisien. Dengan demikian UMKM akan mempunyai kekuatan dalam bersaing dengan pelaku bisnis lainnya, baik dari dalam maupun luar negeri. Pengembangan Kemitraan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sikka dalam proses pengembangan UMKM adalah dengan memfasilitasi para mitra binaan dengan diberikan pendidikan dan pelatihan yang diadakan dua atau tiga kali dalam setahun untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan para UMKM.

Dengan pemberian pelatihan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang manajemen yang baik, literasi digital dalam memasarkan produk-produk usaha sehingga usaha yang dijalankan dapat berkembang dengan baik dan lebih profesional dalam mengelolah usahanya. Dalam hal teknis yang dilakukan seperti beberapa bulan yang lalu melakukan pengolahan bahan lokal seperti biji kelor menjadi tempe dan daur kelor menjadi stick kelor dan kerupuk kelor sehingga hal tersebut dapat menambah nilai jual pada produk tersebut. Selain pendidikan dan pelatihan yang dijalankan, adanya pendampingan yang di berikan berkaitan dengan NIB (Nomor Induk Berusaha).

Hasil penelitian ini sejalan dengan Siddiq (2020) yang menunjukkan hasil bahwa pengembangan UMKM yang dilakukan telah berjalan baik sebagaimana yang terlihat dari bantuan peralatan, pemasaran produk dan program pelatihan kewirausahaan, pemanfaatan teknologi yang dilakukan secara maksimal, dan pemberian izin dalam berusaha.

e. Pelatihan Pemerintah

Menurut (Adelia, 2021), Pelatihan pemerintah adalah perlu meningkatkan pelatihan bagi UMKM baik dalam aspek kewiraswastan, manajemen, administrasi dan pengetahuan serta keterampilannya dalam pengembangan usaha. Di samping itu juga perlu diberiksempatan untuk menerapkan hasil pelatihan di lapangan untuk mempraktekan teori melalui pengembangan kemitraan rintisan. Kegiatan pemasaran yang dilakukan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sikka yaitu dalam pengolahan abon ikan dan banggunya Rumah Pemasaran Produk UMKM bagi para pelaku UMKM sehingga dapat memasarkan produk-produknya. Dengan kegiatan yang dilakukan tersebut bertujuan untuk menjaga kestabilan produk usaha yang semakin berkembang dipasaran.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Amiruddin (2018) yang menunjukkan hasil bahwa Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) binaan dinas perdagangan kota surabaya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan telah meningkatkan keterlibatann UKM dalam kegiatan pertemuan dan pelatihan melalui media online dan media offline.

3) Upaya Pelaksanaan Program Pengembangan UMKM yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM berjalan dengan Efektif.

Efektivitas berasal dari kata efektif adalah pengukuran dalam arti bawah yang telah ditemukan atau pencapaian suatu tujuan mengukur apakah tujuan itu tercapai berdasarkan apa yang direcanakan untuk membuat program . Efektivitas ini menunjukkan berapa baik tagret dapat mencapai tujuan yang dapat Anda lihat dengan kualitas yang tepat.

Berikut Pertumbuhan Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tahun 2021-2023 di Kabupaten Sikka.

Tabel 1. Pertumbuhan jumlah UMKM di Kabupaten Sikka Tahun 2021-2023

No.	Tahun	Rincian Usaha						Jumlah
		Perdagangan	Jasa	Industri Pengolahan	Peternakan	Perikanan	Pertanian	
1	2021	5.315	600	550	710	68	123	7.366
2	2022	5.900	630	612	715	80	171	8.108
3	2023	6.521	742	631	731	98	190	8.913
Total								24.382

Sumber Data: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sikka 2024

Berdasarkan data Pertumbuhan UMKM di Kabupaten Sikka terus meningkat pada tahun 2021 hingga 2023, yaitu pada tahun usaha Perdagangan memiliki 5.315 usaha kemudian usaha Jasa mencapai 600 usaha kemudian usaha Industri Pengolahan mencapai 550 usaha kemudian usaha Peternakan mencapai 710 usaha kemudian usaha Perikanan mencapai 68 usaha kemudian usaha Pertanian mencapai 123 usaha sehingga total jumlah pertumbuhan UMKM tahun 2021 mencapai 7366, pada tahun 2022 mengalami peningkatan.

Pada tahun 2022 mengalami peningkatan usaha Perdagangan memiliki 5.900 usaha kemudian usaha Jasa mencapai 630 usaha kemudian usaha Industri Pengolahan mencapai 612 usaha kemudian usaha Peternakan mencapai 715 usaha kemudian usaha Perikanan mencapai 80 usaha kemudian usaha Pertanian mencapai 171 usaha sehingga total jumlah pertumbuhan UMKM tahun 2022 mencapai 8.108, pada tahun 2023 mengalami peningkatan lagi usaha Perdagangan memiliki 6.521 usaha kemudian usaha Jasa mencapai 742 usaha kemudian usaha Industri Pengolahan mencapai 631 usaha kemudian usaha Peternakan mencapai 731 usaha kemudian usaha Perikanan mencapai 98 usaha kemudian usaha Pertanian mencapai 190 usaha sehingga total jumlah pertumbuhan UMKM tahun 2021 mencapai 8.913, total semua pertumbuhan UMKM Kabupaten Sikka tahun 2021-2023 mencapai 24.382.

Peningkatan jumlah usaha ini dipengaruhi oleh proses sosialisasi dalam kegiatan pemberdayaan dan pengembangan UMKM yang dilaksanakan sebagai penguatan modal melalui melalui pogram, selain itu juga masyarakat kabupaten Sikka mayoritas usahanya di bidang perdagangan dan memanfaatkan social media untuk berjualan dari rumah dan tingkat peminatan pun meningkat karena masyarakat yang

tidak keluar rumah dan berkerja di rumah senang untuk belanja di social media . Pada kenyatannya meskipun jumlah UMKM di Kabupaten Sikka cukup tinggi, namun keberadaan dari UMKM ini bukan berarti tanpa masalah. Permasalahan yang dihadapi UMKM yaitu banyak pelaku UMKM kurang mengembangkan usahanya dikarenakan adanya keterbatasan modal, pemasaran, pengolahan yang kurang professional, kurangnya penguasaan teknologi dan informasi, dan para pelaku UMKM masih belum bisa bersaing secara kompetitif dengan para pelaku ekonomi lainnya, pelaku UMKM juga kurang maksimal dalam sumber daya manusianya untuk berkreasi dan berinovasi dalam menciptakan produk yang berkualitas dan layak jual dikarenakan terbatasnya pengetahuan yang dimiliki oleh para pelaku UMKM, serta para pelaku UMKM belum begitu memahami tentang akuntansi seperti pencatatan keuangan dan pembukuan yang baik. Padahal dengan adanya pembukuan pelaku usaha bisa mengetahui sehat atau tidaknya usaha mereka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pelaksanaan pogram pengembangan UMKM yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sikka belum berjalan dengan efektif dikarenakan berbagai kendala yakni dari faktor internal seperti kekurangan anggaran untuk pendampingan pembinaan, serta faktor eksternal seperti jiwa kewirausahaan yang masih rendah, tingkat konsumtif terhadap produk yang dihasilkan UMKM juga rendah, serta rendahnya pemasaran atas produk lokal yang dihasilkan dari pelaku UMKM. Selain itu kendala utama yang dihadapi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sikka yaitu berkaitan dengan SDM pelaku UMKM yang mana masih minim pengetahuan dan wawasan dalam berwirausaha. Hal ini juga sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri (2017) Hasil penelitian ini menyatakan bawah efektifitas pembinaan yang dilakukan oleh dinas sudah berjalan cukup maksimal akan tetapi faktor penghambat yaitu anggaran, kemampuan teknik produksi dan manajemen terbatas, kemampuan teknis produksi manajemen terbatas serta pemasaran yang relative sulit.

5. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisi yang dilakukan, maka kesimpulan yang diambil dari judul Analisis Efektivitas Peranan Strategis Dinas Koperasi Dan UKM Dalam Upaya Pelaksanaan Program Pengembangan UMKM di kabupaten Sikka,yaitu:

- 1) Peranaan strategis Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sikka dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Sikka?

Peranan strategis yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kab. Sikka yakni pendidikan dan pelatihan yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan kemampuan dari para pelaku UMKM serta memfasilitasi dalam proses pengurusan legalisasi usaha seperti perijinan, sertifikat MUI, halal dan sebagainya. Pendidikan dan pelatihan yang diberikan berisi tentang pengetahuan, wawasan dan diklat teknis dengan langsung melakukan pelatihan berupa pengolahan bahan lokal. Ada juga diklat- diklat pengetahuan terkait dengan bagaimana meningkatkan wawasan pelaku UMKM, berkaitan dengan literasi digital, literasi keuangan tentang pengetahuan dan bagaimana tentang kewirausahaan itu sendiri yang ilmu pengetahuannya harus diketahui oleh pelaku UMKM.

- 2) Upaya Dinas Koperasi dan UMKM dalam melaksanakan program pengembangan UMKM?

Terdapat berbagai upaya yang telah dilakukan seperti memberikan pelatihan-pelatihan kepada UMKM baik pelatihan teknis maupun pelatihan guna meningkatkan wawasan pelaku UMKM. Bentuk Pelatihan yang diberikan seperti pengolahan abon ikan, pelatihan manajemen kewirausahaan, mengurus surat ijin. Selain itu bentuk pelatihan lainnya yaitu berkaitan dengan produk pengolah dari bahan mentah menjadi bahan baku misalnya pengolahan coklat dari bahan dasar coklat dan dari bahan dasar mente, dari bahan dasar kelor atau daun kelor menjadi stik dan kerupuk kelor, kemudian digitalisasi pemasaran bagaimana memasarkan produk- produk secara online dengan menggunakan hp android. Dinas UKM dan Koperasi Kabupaten Sikka juga melakukan evaluasi terkait bentuk bentuk pelatihan yang telah diberikan dan juga hal hal apa saja yang mendukung pertumbuhan UMKM di Kabupaten Sikka seperti evaluasi mengenai kemampuan analisa bisnis serta akses permodalan bagi pelaku UMKM di Kabupaten Sikka.

- 3) Upaya pelaksanaan program pengembangan UMKM yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM berjalan dengan Efektif?

Upaya pelaksanaan program pengembangan UMKM yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sikka belum berjalan dengan efektif dikarenakan berbagai kendala yakni dari faktor internal seperti kekurangan anggaran untuk pendampingan pembinaan, serta faktor eksternal seperti jiwa kewirausahaan yang masih rendah, tingkat konsumtif terhadap produk yang dihasilkan UMKM juga

rendah, serta rendahnya pemasaran atas produk lokal yang dihasilkan dari pelaku UMKM. Selain itu kendala utama yang dihadapi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sikka yaitu berkaitan dengan SDM pelaku UMKM yang mana masih minim pengetahuan dan wawasan dalam berwirausaha.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dibuat maka saran yang dapat disampaikan penulis sebagai berikut:

- 1) Dari segi permodalan pemerintah seharusnya lebih membantu dan membuat kebijakan yang mendukung permodalan pelaku UMKM
- 2) Dinas Koperasi dan UKM perlu lebih meningkatkan pendidikan dan pelatihan tentang manajemen keuangan yang baik dan benar kepada semua para pelaku usaha sehingga mereka dapat menganalisis bisnis dan mampu membuat rencana bisnis sehingga mampu mengetahui apakah bisnis yang dijalankan mengalami perkembangan.
- 3) Dinas Koperasi dan UKM diharapkan mampu memperbayak kegiatan yang melibatkan pelaku usaha seperti festival dan pameran yang mendukung kegiatan pelaku UMKM
- 4) Untuk para pelaku usaha agar lebih meningkatkan produk UMKMnya dan mengembangkan usahanya yaitu dengan inovasi-inovasi yang dengan mengikuti perkembangan zaman agar produknya lebih banyak di sukai dalam pasar lokal, agar dapat bersaing dengan produk produk impor lainnya.
- 5) Untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan peranan Dinas Koperasi dan UKM dalam pengembangan usaha kecil dan menengah di Kabupaten Sikka agar hasil peneliti dapat lebih lengkap lagi.

Keterbatasan Penelitian

Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

- 1) Penelitian ini hanya menggunakan analisis kualitatif yang hanya mengacu pada hasil wawancara, serta tahun yang digunakan dalam penelitian ini hanya tiga tahun yaitu tahun 2021-2023, Sedangkan akan lebih baik digunakan dengan analisis kuantitatif agar hasil penelitian lebih akurat.

REFERENSI

- Adelia, A. P. (2021). *Analisis strategi pemasaran pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) kerupuk lemi pada era digital di Kecamatan Losari Kabupaten Brebes*. Politeknik Harapan Bersama Tegal.
- Arikunto, S. (2017). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta.
- Arisandy, Y., Harpepen, A., & Kurniawan, A. (2017). *Sistem informasi manajemen: Teori dan implementasi dalam bisnis* (A. Sunarto, Ed.). Pustaka Pelajar.
- Gibson, J. L., Ivancevich, J. M., & Donnelly, J. H. (2018). *Organisasi: Perilaku, struktur, proses* (Terjemahan, Edisi Delapan). Binarupa Aksara.
- Kurniyawati, Y., Mahmudi, A., & Wahyuningrum, E. (2019). Efektivitas problem-based learning ditinjau dari keterampilan pemecahan masalah dan kemandirian belajar matematis. *Jurnal Riset Pendidikan Matematika*, 6(1), 118–129. <https://doi.org/10.21831/jrpm.v6i1.26985>
- Mahmudi. (2019). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah*. Penerbit STIM YPKN.
- Meleong, M. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi Revisi, p. 410). .
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi penelitian kualitatif*. Rosdakarya.
- Panjaitan, S. I. (2019). *Peran pemberdayaan Dinas Koperasi dan UMKM dalam pengembangan usaha mikro kecil menengah Kota Medan* (Studi pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan). Universitas Sumatera Utara.
- Rafidah, R., Addirahman, A., & Raudati, R. (2017). Analisis peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Jambi dalam pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah yang mendapatkan pembiayaan BRI Syariah. *IJEB*, 2(1).
- Rahmadayanti. (1967). Peran Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Buton dalam pengembangan sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton. *Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local*, 1(69), 5–24.
- Sari Nurrohmah Yuniarta, L., Kurniati, L., Purga, R., Yarmunida, M., & Oktarina, A. (2021). Strategi bertahan UMKM di masa pandemi COVID-19 (Studi kasus di Kota Bengkulu). *Journal of Indonesian Management*, 1(3), 316–322.
- Steers, R. M. (2022). *Efektivitas organisasi* (Penerjemah: Magdalena Jamin). Erlangga.
- Sugiyono. (2019). *Metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D*. ALFABETA.
- Sujarweni, V. W. (2019). *Metodologi penelitian bisnis & ekonomi*. Pustaka Baru Pres.
- Sumarno, S., & Imawati, V. (2023). Pengembangan bakat untuk atlet di usia muda: Pembahasan dalam pendekatan spesialisasi awal versus multilateral. *Patria Educational Journal (PEJ)*, 3(2), 99–108. <https://doi.org/10.28926/pej.v3i2.1014>
- Suryaningrum, K., Pangkey, M., & Kiyai, B. (2015). Efektivitas pelaksanaan program pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM): Suatu studi di Dinas

Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kota Manado. *Jurnal Administrasi Publik*, 2(30). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/article/view/8014>

Tambunan, T. (2012). *Usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia*. LP3ES.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.